

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS PENYELENGGARAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE  
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA TANJUNG  
SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Islam Riau*

**NURFADILAH**

**NPM : 167310012**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2020**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmannirrahim.....**

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan Kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam. Dan Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana ( S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yaitu dengan judul :

**“ Analisis Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir”.**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses Skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Syafrinaldi SH. MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulianto S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Pembimbing I penulis sekaligus Dosen Ilmu Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam Skripsi ini.
5. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Usulan Penelitian ini.
6. Saya ucapkan terimakasih terkhusus dan teristimewa buat keluarga tercinta Ayahanda “SAUTI” dan Ibunda “ZUBAIDA ASIH” serta kakak “ERMA”, adik “DAYA, ISAN, LIA, IPAN”, yang senantiasa mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, dukungan, support, serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis bermohon Kepada Allah SWT semoga

keluarga tercinta saya semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya.

7. Kepada seluruh sahabat saya, yaitu Natasya kiki Mariska, Yuni Hartati, Rani Puji Astuti, Nadya Natasya, Eriska Kanza, Zamhariro, Putri Salmedi, Utari Nur Wijayanti, Rusmita, Cici Sundari , Syafila, Nur Halimah dan Teman-teman kelas IP.A dan IP.H yang telah banyak memberi support dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan sukses dimasa depan, Amin Ya Robbal'alam.
8. Kepada seluruh teman organisasi baik dalam kampus maupun luar kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu dan motivasinya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari Bapak/ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, April 2020

Penulis

**Nurfadilah**



## DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xix

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Batasan Penilitia .....	22
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	23

### BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan.....	25
1. Pemerintahan.....	25
2. Azas Penyelenggaraan Pemerintah .....	29
3. Teori Manajemen .....	31
4. Teori Manajemen Sumberdaya Manusia .....	33
5. Teori Kebijakan Pemerintah .....	37
6. Konsep Pemerintahan Desa.....	40
7. Konsep Good Governance .....	41
B. Penelitian Terdahulu .....	44
C. Kerangka Pikir.....	45
D. Konsep Operasional .....	46
E. Operasionalisasi Variabel.....	49
F. Teknik Pengukuran .....	50

### BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Populasi dan Sampel .....	54

D. Teknik Penarikan sampel .....	55
E. Jenis dan Sumber data .....	55
F. Teknik Pengumpulan data .....	56
G. Teknik Analisis data .....	56
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	58

#### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

VI.1 Sejarah Singkat Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran kabupaten Inderagiri Hilir .....	59
A. Demografi .....	62
B. Luas Wilayah .....	62
C. Orbitasi .....	62
VI.2 Keadaan Penduduk .....	63
VI.3 Keadaan Sosial .....	63
VI.4 Keadaan Ekonomi .....	64
1. Mata Pencaharian .....	64
2. Pertanian .....	65
VI.5 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Tanjung Simpang .	66
VI.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	67

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	68
1. Jenis Kelamin Responden .....	69
2. Unsur Responden .....	69
3. Tingkat Pendidikan Responden .....	70
B. Hasil Penelitian Tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	71
1. Indikator Akuntabilitas .....	72
2. Indikator Transparansi .....	77
3. Indikator Partisipasi .....	82
4. Indikator Pengentasan Kemiskinan .....	87
C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	95

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>100</b>
---------------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>
----------------------	------------



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>halaman</b>
I.1	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjung Simpang Tahun Anggaran 2018 .....	9
I.2	: jumlah Penduduk Desa Tanjung Simpang Berdasarkan Jenis Kelamin .....	13
I.3	: prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres dan Perka LKPP .....	13
I.4	: Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).....	15
II.1	: Penelitian terdahulu yang relevan .....	44
II.2	: Operasionalisasi Variabel Tentang Analisa Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir .....	49
III.1	: Populasi Dan Sampel Analisis Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir .....	55
III.II	: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Analisis Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir .....	58
4.1	Luas dan Persentase wilayah menurut kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir tahun 2011 .....	61
4.2	Jumlah Penduduk Desa Tanjung Simpang Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63



4.3	Jumlah Sarana Ibadah.....	64
4.4	Jumlah Penduduk Desa Tanjung Simpang Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	65
4.5	Luas bersarkan Jenis Pertanian .....	65
V.1	Jenis Kelamin Responden Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	69
V.2	Umur Responden Berdasarkan Usia Termuda dan Tertua .....	70
V.3	Tingkat Pendidikan Respoden Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	70
V.4	Penelitian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Akuntabilitas Pada Penelitian Penyelenggaraan Perinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	73
V.5	Penelitian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Akuntabilitas Pada Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir .....	75
V.6	Penelitian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Transparansi Pada Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	78
V.7	Penelitian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Transparansi Pada Penelitian	

	Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	80
V.8	Penelitian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Partisipasi Pada Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	83
V.9	Penelitian Responden Masyarakat Desa Tentang Indikator Partisipasi Pada Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	85
V.10	Penelitian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Pengentasan Kemiskinan Pada Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	87
V.11	Penelitian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Pengentasan Kemiskinan Pada Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	89
V.12	Rekapitulasi Tanggapan Respoden Unsur Desa Penelitian Tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governannce Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	92
V.13	Rekapitulasi Tanggapan Respoden Unsur Masyarakat Penelitian Tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governannce Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Tentang Analisis Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir	46
IV.I	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir	67

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran1 kuisisioner .....	105
Lampiran 2 kuisisioner .....	115
Lampiran 3 wawancara.....	125
Lampiran 4 data telly.....	126
Lampiran 5 dokumentasi penelitian.....	130
Lampiran 6 laporan realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Tanjung Simpang Tahun Anggaran 2018 .....	131
Lampiran 7 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia .....	132



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfadilah  
Npm : 167310012  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 5 Maret 2020



**ANALISIS PENYELENGGARAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE  
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA  
TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**ABSTRAK**

NURFADILAH

167310012

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pelaksanaan *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hillir dan Menganalisis penyelenggaraan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator penilaian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang digunakan meliputi Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengentasan Kemiskinan. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah Survey deskriptif metode kuantitatif yaitu Berangkat dari data, catatan lapangan, observasi, kuisoner, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Populasi dan Sampel penelitian ini berjumlah Tiga Puluh, Kepala Desa, Sekdes, Kepala Dusun, Kepala Urusan Berjumlah 4, BPD berjumlah 3 dan Masyarakat berjumlah 20 orang. Jenis pengumpulan data terdiri dari data primer, data sekunder, struktur organisasi pemerintah Desa. Sementara teknis analisa data diperjelas dengan hasil Observasi, kuisioner, wawancara, dokumentasi, data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjelaskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul peneliti untuk diambil kesimpulan bahwa Analisis Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dalam kategori Cukup Baik.

*Kata Kunci : Penyelenggaraan, Good Governance, Pengadaan, Barang, Jasa*

**GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE ANALYSIS OF THE  
PROVISION OF GOODS AND SERVICES IN VILLAGE  
TANJUNG SIMPANG KECAMATAN PELANGIRAN  
REGIONAL INDRAGIRI DISTRICT**

**ABSTRACT**

**NURFADILAH**

**167310012**

*This study aims to Analyze the implementation of good governance in the procurement of goods and services in Tanjung Simpang Village, Pelangiran District, Indragiri Hillir Regency and Analyze the implementation of governance of goods and services procurement in Tanjung Simpang Village, Pelangiran District, Indragiri Hilir Regency. Assessment indicators for the Implementation of Good Governance Principles in the Procurement of Goods and Services used include Accountability, Transparency, Participation, Poverty Alleviation. This type of research, located in the village of Tanjung Simpang, Pelangiran Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, is a descriptive quantitative survey method that is Departing from data, field notes, observations, questionnaires, interviews and documentation as data collection tools. The population and sample of this study were Thirty, the Village Head, the Village Secretary, the Village Head, the Head of Affairs with 4 Counts, the BPD with 3 and the Community with 20 people. Types of data collection consist of primary data, secondary data, the organizational structure of the village government. While the technical analysis of the data is clarified with the results of observations, questionnaires, interviews, documentation, the data is processed and analyzed to explain the research objectives, then compared with theories related to the title of the researcher to conclude that the Analysis of the Implementation of the Principles of Good Governance in the Procurement of Goods and Services In Tanjung Simpang Village, Pelangiran Subdistrict, Indragiri Hilir Regency in the Pretty Good category.*

*Keywords: Implementation, Good Governance, Procurement, Goods, Services*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia maka disusunlah sistem pemerintahan rasional yang terdiri Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsinya, kabupaten dan kota mempunya pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka di tetapkan UU No 32 tahun 2004 yang sekarang di ganti dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.



Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan Kota, yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah-daerah tersebut kesemuanya diatur menurut undang-undang.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlakukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud, tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama yaitu Tujuan Negara Indonesia.

Pada masa kini terlihat dari buruknya tata kelola pemerintahan terlihat dari tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, pengangguran, gizi buruk, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta ketimpangan antara kalangan masyarakat yang semakin nyata. Pemerintah atau government menjadi baik atau buruk dikarenakan *governancenya* (tata pemerintahannya). Karena itu muncullah istilah *good governance* (tata pemerintahan yang baik), dan sebaliknya muncul pula istilah *bad governance* (tata pemerintahan yang buruk).

*Good governance* menurut Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil merumuskan arti *good governance* adalah pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Menurut Sedermayanti (2012 :7 ) terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penganggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang di tetapkan.

2. Transparansi yaitu pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyat, baik ditingkat pusat maupun daerah.
  3. Keterbukaan merupakan menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang di nilainya tidak transparan.
  4. Aturan Hukum merupakan pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
- Pemerintah yang berfungsi baik adalah pemerintah yang memiliki

birokrasi berkualitas tinggi, sukses dalam menyediakan layanan publik yang esensial, dapat mengelola anggaran negara yang efektif, tepat sasaran dan betul-betul untuk mensejahterakan rakyat, serta demokratis.

Penerapan *good governance* bukan hanya pada tingkat yang lebih tinggi seperti Provinsi, Kabupaten maupun kecamatan, khususnya pada pemerintahan desa dapat dilaksanakan juga untuk menjadikan pemerintah desa lebih baik dan lebih bersih. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam setiap pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Selanjutnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Peran kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) di Indonesia dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan. Pada era reformasi hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru.

Pemberian otonomi daerah yang dimaksud pemberian wewenang daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan Desa harus dilaksanakan dengan baik dan maksimal atau penyelenggaraan *good governance*, dapat di ketahui bahwa desa dan pemerintah desa dapat melaksanakan *Good governance* sebagai mana terdapat pada Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada IV kewenangan Desa pasal 18 meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan permasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa



masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya pasal 19 kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berdasarkan desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk di dalamnya penyelenggaraan keuangan perlu diatur tersendiri dalam peraturan perundangan. Penyelenggaraan keuangan desa termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan bentuk pengelolaan atas dana desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 25 pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa yang disebut dengan nama lain. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 (2), kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentunan dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1, kepala

desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan asset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dari kewajiban kepala desa diatas dapat terlihat salah satu kewajiban

kepala desa adalah melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau pemerintahan Baik (good Governance), seperti yang di nyatakan Sedermayanti (2012 : 10) terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan menciptakan tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Peran pemerintah desa dalam melaksanakan *Good Governance* adalah pelaksanaan dan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam rangka membangun *good governance* di daerah paling tidak ada beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu prinsip kepastian hukum, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas dan partisipasi ( Teguh Yuwono, 2001 : 74).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ditekan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidak jelasan bagi para pelaku dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut M. Munandar (2000 : 10) dalam bukunya *Budgeting Perencanaan kerja, pengkoordinasian kerja, pengawasan kerja* mengemukakan bahwa anggaran mempunyai kegunaan pokok, yaitu :

1. Sebagai pedoman kerja
2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja
3. Sebagai alat pengawasan kerja.

Anggran digunakan dalam salah satu Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa. Tujuannya adalah memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu. Anggaran sebagai alat kebijakna fiskal pemerintah digunakan untuk



menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

Sedangkan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang diteransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjung Simpang Tahun 2018 yang mana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjung Simpang Tahun Anggaran 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Tarnsfer</b>	<b>1.645.540.000,00</b>	<b>1.645.540.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	Dana Desa	707.542.000,00	707.542.000,00	0,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	20.001.000,00	20.001.000,00	0,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	817.997.000,00	817.997.000,00	0,00
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.645.540.000,00</b>	<b>1.645.540.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	558.397.157,00	554.923.000,00	3.474.156,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	986.198.500,00	978.091.000,00	8.107.500,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	93.378.500,00	85.028.500,00	8.350.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	33.743.500,00	32.551.833,00	1.191.667,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.671.717.657,00</b>	<b>1.650.594.333,00</b>	<b>21.123.324,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEEFISIT)</b>	<b>(26.177.657,00)</b>	<b>(5.054.333,00)</b>	<b>(21.123.324,00)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	26.177.657,00	26.177.657,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	26.177.657,00	26.177.657,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>26.177.657,00</b>	<b>26.177.657,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>21.123.324,00</b>	<b>(21.123.324,00)</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung Simpang 2019*



Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa pendapatan desa dalam bentuk Transfer yang sebesar 1.645.540.000,00 , Dana Desa sebesar 707.542.000,00 , bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 20.001.000,00 , alokasi dana desa sebesar 817.997.000,00, bentuk keuangan provinsi 100.000.000,00 jadi jumlah pendapatan sebesar 1.645.540.000,00.

Belanja terbagi atas bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 558.397.157,00 , bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 986.198.500,00 , bidang pembinaan Kemasyarakatan sebesar 93.378.500,00 sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 33.743.500,00 jadi jumlah belanja sebesar 1.671.171.657,00 sedangkan surplus/(defisit) sebesar (26.177.647,00)

Pembiayaan yang mana penerimaan pembiayaan sebesar 26.177.657,00 dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar 26.177.657,00 jadi jumlah pembiayaan sebesar 26.177.657,00 sedangkan sisa lebih/(Kurang) perhitungan anggaran 0,00

Untuk melihat lebih rinci terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa TANJUNG Simpang Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Lampiran 6 Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjung Simpang Tahun Anggaran 2018.

Jadi, Salah satu bentuk pengelolaan dana desa adalah Belanja Desa, dimana salah satunya adalah dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Untuk memenuhi unsur pemerintahan yang baik, maka pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di desa perlu diatur dengan

suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai pedoman untuk penyusunan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dalam APBDesa, maka disusunlah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahannya). Dengan demikian diharapkan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dapat menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahannya tersebut.

Namun demikian, Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber APBDes belum mempunyai payung hukum yang jelas, sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pedoman tata cara Pengadaan Barang/Jasa di desa sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati/Walikota Tentang tata cara Pengadaan Barang/jasa di desa,dengan demikian Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki Peraturan Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Maka Pedoman Yang Digunakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Menggunakan Peraturan Kepala LKPP, agar pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

Salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang menggunakan peraturan Kepala LKPP dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Pulau Sumatra, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daerah 11.605,97 km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 Km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Inderagiri Hilir yang sekarang terkenal dengan julukan “ NEGRI SERIBU JEMBATAN ” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografi Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas pemukiman laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Sementara itu, kecamatan Pelangiran terdiri dari 1 kelurahan dan 15 Desa dengan luas wilayah 531,22 Km<sup>2</sup> atau 53,122 Ha. Batasan – batasan wilayah Kecamatan Pelangiran yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Taluk Belengkong, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kateman dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mandah. Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Pelangiran dari permukaan laut adalah 1 sampai 4 meter, di tepi-tepi sungai dan muara-muara parit banyak terdapat tumbuhan-tumbuhan seperti pohon nipah.

Berikut dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di Desa Tanjung Simpang berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan agama yang dianut sebagai berikut :

**Tabel 1.2 jumlah Penduduk Desa Tanjung Simpang Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kode	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
RT 01	83	96	179
RT 02	155	122	277
RT 03	198	197	395
RT 04	101	116	217
RT 05	102	82	184
RT 06	123	117	240
RT 07	38	29	67
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>759</b>	<b>1.559</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung Simpang, 2019*

Perbandingan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres 54 tahun 2010, Perka LKPP nomor 13 tahun 2013 dan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015. Perubahan Perka LKPP nomor 13 Tahun 2013 ke Perka LKPP No 22 tahun 2015 tidak ada perubahan mengenai prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

**Tabel 1.3 prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres dan Perka LKPP**

Perpres No. 54 Tahun 2010	Perka LKPP No.13 Tahun 2013	Perka LKPP No. 22 Tahun 2015
1	2	3
Efisien	Efisien	Efisien
Efektif	Efektif	Efektif
Transparan	Transparan	Transparan
Terbuka	Pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat
Bersaing	Gotong royong	Gotong Royong
Adil/tidak diskriminatif	Akuntabel	Akuntabel
Akuntabel		

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2015, menerapkan perinsip-prinsip sebagai berikut :



1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
4. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembagunan desanya;
5. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembagunan di desa; dan
6. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Salah satu tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien yang disebut dengan *good governance*. Good governance adalah suatu

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar.

*Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses penciptaan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai mana suatu konsensus yang diciptakan oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara (Hardijasoemantri,2003).

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan akan membutuhkan barang/jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika meliputi bertanggung jawab, memecah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013, tugas pengelolaan pengadaan barang/jasa di desa disederhanakan dan dilaksanakan hanya oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), baik pengadaan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. Adapun tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang dan jasa di desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.4 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Panitia
1	Edi Indra Kesuma	KAUR PERENCANA	KETUA TPK
2	Syahroni	KETUA RT 01	SEKRETARIS TPK
3	Asri	KEPALA DUSUN TANJUNG SIMPANG	ANGGOTA

Tugas TPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa desa meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan. Tugas TPK secara spesifik yaitu :

1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Menyusun spesifik teknis barang/jasa apabila diperlukan
3. Melaksanakan pembelian/pengadaan
4. Memberikan penawaran
5. Melakukan negosiasi (tawar menawar)
6. Menandatangani surat perjanjian (ketua TKP)
7. Melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan
8. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa, dan
9. Menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada kepala desa.

TPK ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan dengan susunan terdiri atas ketua dan anggota, dapat pula diisi dengan struktur wakil ketua dan sekretaris. Kedudukan TPK adalah semacam Unit Layanan Pengadaan yang ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah Lainnya.

*Good Governance* (Tata Kepemerintahan yang baik) merupakan isu sentral yang paling mengemukakan dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Sadu Wasistiono (2003:23) mengemukakan bahwa tuntutan akan *good governance* timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga Negara untuk menciptakan system atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melencengkan dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*. Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan *Good Governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi,

kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.

Di dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Di Desa ini masih ada ketidak sesuaian dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, menurut Brian C. Smith bahwa prinsip-prinsip good governance sebagai berikut :

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Partisipasi
4. Penegakan hukum
5. Pencegahan korupsi
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Orientasi Kesepakatan
8. Wawasan ke Depan
9. Desentralisasi

Penerapan good governance dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudi, 2002: 8). Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.



Akuntabilitas merupakan merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997: 29).

## 2. Transparansi

Transparan adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

## 3. Partisipasi

Partisipasi dalam hal ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Partisipasi juga menyangkut kebebasan untuk berkumpul, berorganisasi dalam menentukan masa depan.

## 4. Penegakan Hukum

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu oleh para penstudi hukum adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk

menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Roscoe Pound dalam Hadjon (2010: 76) menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

#### 5. Pencegahan Korupsi

Korupsi merupakan suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang kita ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroiti korupsi dari segi politik dan ekonomi.

#### 6. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksud untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.

#### 7. Orientasi Kesepakatan

Konsensus berkaitan erat dengan isi dan sifat dari sebuah hukum dan Undang-undang. Email Durkheim dalam Rewansyah (2010: 97) berteori bahwa isi dan sifat umum Undang-Undang tumbuh dari semacam “solidaritas” yang mencirikan masyarakat tersebut. Jadi undang-undang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan terbentuk dari perilaku masyarakat itu sendiri ketika masyarakat melakukan tindakan-tindakan penyimpangan maka lahirlah aturan-aturan perundang-undangan tersebut untuk dapat mengontrol perilaku menyimpang yang ditimbulkan oleh masyarakat tersebut. Maka wajar ketika disuatu daerah atau negara yang masyarakatnya terdapat banyak penyimpangan maka undang-undangnyapun banyak mengalami perubahan maupun penambahan.

Konsensus dalam tata kelola pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas daripada pemerintahan. Tata kelola pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Ada 2 (dua) hal penting dalam hubungan ini yaitu:

1. Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya.
  2. Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan di antara mereka.
8. Desentralisasi

Kewenangan pada pemerintah Kabupaten/Kota hanya pada sub urusan energy baru terbarukan.

Dari uraian diatas penulis melihat ada beberapa fenomena yang mendukung diadakannya penelitian ini antara lain :

1. Dalam pengadaan barang dan jasa terjadi ketidak sesuaian dengan prosedur pelaksanaan dimana menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa karna tidak adanya penanggung jawaban terhadap pengadaan barang dan jasa.
2. Belum transparannya pemerintah desa dalam pengadaan barang dan jasa terkait informasi mengenai setiap aspek dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat dijangkau publik dan terkait pelaporan keuangan masih sulit untuk didapatkan informasi.
3. Dalam partisipasi yang merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa masih sulit dikarenakan masih memiliki ego yang tinggi terhadap Tim Pelaksana Pengadaan sehingga ini yang menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi.
4. Dalam pengadaan barang dan jasa ini merupakan kegiatan yang bisa membantu ekonomi masyarakat apa lagi jika ada pembnagunan ini merupakan kesempatan yang digunakan untuk masyarakat yang tergolong rentan terhadap kemiskinan namun



kenyataannya masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan ini tidak diperhatikan.

Berdasarkan Fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah tentang bagaimana suatu penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa yang ada di Desa. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir*”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pemilihan judul penelitian sebagai mana tersebut di atas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Bagimanakah Konsep *Good Governance* dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bagaimana Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **C. Batasan Penelitian**

Penulis membatasi Indikator yang di gunakan dalam penelitian yang mana dalam prinsip-prinsip *Good Governance* ini menggunakan teori Brian. C Smith (2007) yang mana prinsip-prinsipnya antara lain Akuntabilitas, Transparansi,

Partisipasi, Penegakan Hukum, Pencegahan Korupsi, Pengentasan Kemiskinan, Orientasi Kesepakatan, Wawasan ke Depan dan Desentralisasi.

Akan tetapi disini penulis hanya menggunakan beberapa diantara prinsip-prinsip tersebut yaitu :

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Partisipasi
4. Pengentasan Kemiskinan

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, akan menjawab rumusan masalah yang telah dibuat diatas, yaitu :

- a. Menganalisis pelaksanaan *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hillir.
- b. Menganalisis penyelenggaraan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hillir

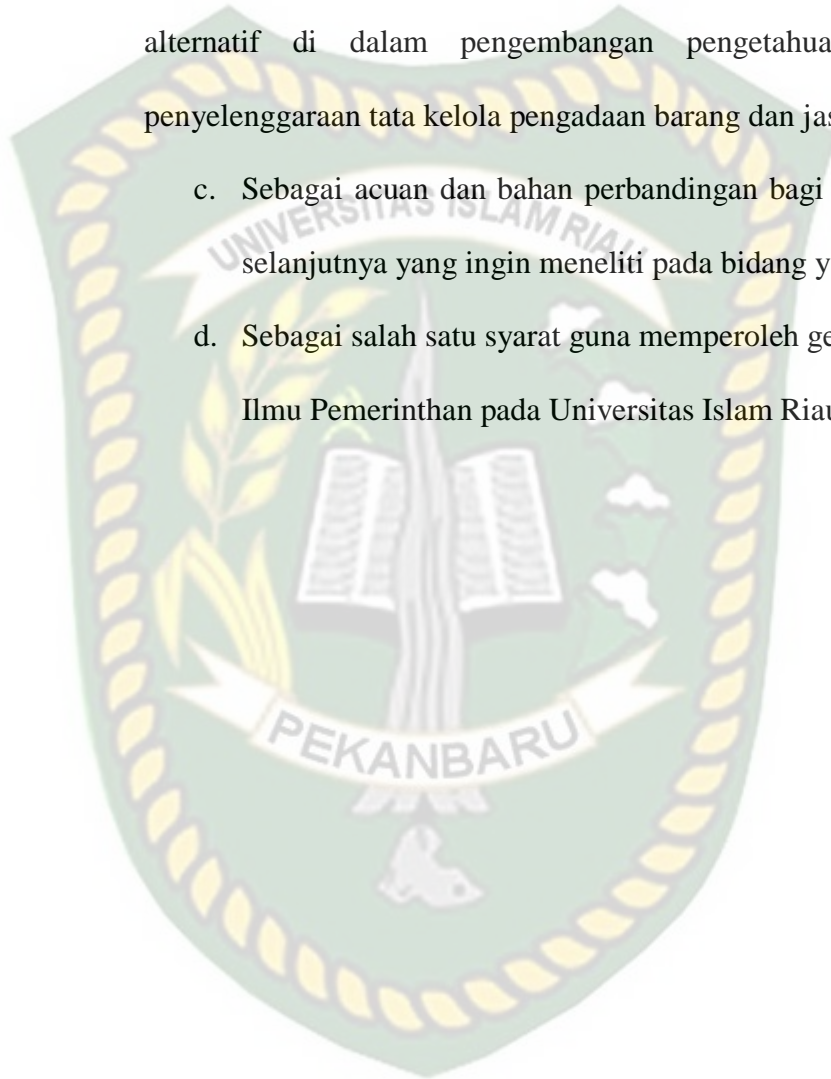
##### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik bagi pemerintah, para akademisi dan pembaca lainnya.

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hillir, dapat dijadikan masukan dan informasi tentang kondisi pelaksanaan tata kelola Barang/Jasa di Desa Tanjung Simpang Kabupaten Indragiri Hillir

ini dapat dijadikan rujukan dalam membuat kebijakan guna peningkatan kinerja pegawai Unit layanan Pengadaan barang dan Jasa secara transparan dan bertanggung jawab.

- b. Bagi para akademisi dan pembaca, dapat dijadikan sumber atau alternatif di dalam pengembangan pengetahuan tentang penyelenggaraan tata kelola pengadaan barang dan jasa di desa.
- c. Sebagai acuan dan bahan perbandingan bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin meneliti pada bidang yang sama.
- d. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Universitas Islam Riau



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

##### 1. Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan arti pemerintahan

Menurut C.F Strong (dalam Drs. Inu Kencana Syafie, M.Si, halm. 31) Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.



Sedangkan Menurut Samuel Edwar Finer ( Drs. Inu Kencana Syafiie., M.,Si hal 32) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Selanjutnya Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.

Menurut Syafiie (2011:8) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi,eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembagaserata antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Pendapat Poelje ( dalam Ndraha 2010:16 ) mendefenisikan ilmu pemerintahn sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

MengatakanLabobo (2011:2) ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dai manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperinta.

Selanjutnya Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mepelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerinthan sebuah Negara.

Lalu Budiarto ( 2009 : 21 ) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Rasyid (dalam Labolo 2011:19) mengatakan tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Selanjutnya Syafiie (2011:20) pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat Daerah (UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 dan 3)

Menurut Surbakti (1999:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan

Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengeritannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek structural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintah ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi

pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

## **2. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia Yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai mana yang dimaksud Undang-undang dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
2. Diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
4. Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya
5. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Dengan mendasarkan pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi



segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

- a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :
  1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
  2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 dan 8).
- b. Asas tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/kota dan atau desa dipemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan tugas pembantuan ini adalah :
  1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat.
  2. Urusan yang secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.

3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektif pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.

### 3. Teori Manajemen

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasran yang telah ditetapkan semula (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut The liang gie manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai (dalam Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut Munandar (2014:1) Manajemen berarti proses mengoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif dengan melalui orang lain. Selain efisien dan efektif, mengoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-manajerial. Namun demikian, ada aturan yang mendasarinya, sehingga seorang

manajer tidak bisa semauanya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau setiap tempat.

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003; 5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sementara itu Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai konsep yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan atau keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan semula (dalam Sarwoto, 1983; 46).

Manajemen di definisikan menurut Marry, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (dalam Sabardi, 2001; 3).

Sejalan dengan itu juga Terry mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (dalam Sabardi, 2001; 2).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia uni ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang , bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut The Liang Gie manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Manulang, 2006:8).

#### **4. Teori Manajemen Sumberdaya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk



meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Makin banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.

Maka menurut Kusdyah, (2007:1) Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi.

Masih manajemen menurut Handoko (1996:6) manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Selanjutnya Hasibuan, (2000:10) MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Indah Puji (2014:13) MSDM adalah sebuah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja.

Menurut Marihot, (2002:30), manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi.

Maksud hal mengatakan bahwa sumber daya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan pemeliharaan dalam

usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan dan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung jawabkan.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan.

Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya :

motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

## 5. Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradigm baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakiin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain daripada itu menurut Syafiie (2005;146) ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :



- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirangcang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Selanjutnya pendapat Fiedrich ( dalam Wibawa 2011:2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Pendapat Soebakti (dalam Wibawa 2011:190) bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program prilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebgai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan menurut Boediardjo (2009:20) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuatkebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakkannya.

Kemudian Heinz Evlau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2008 ; 6) adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konstitusi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengaatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai denga bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho,2004:1-7)

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004 :31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hokum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislative, eksekutif, yudikatif, administrasi Negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan ntuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh (Abidin,2004:21).

Sementara itu Aderson dalam Wahab (2004:3) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Aderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh actor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Kemudian Abidin (2004:56) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian criteria. Berikut ini criteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan :

- a. Efektifitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.

Masih menurut Abidin (2004:23) kebijakan public biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada strategis. Sebab kebijakan public berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Kebijakan menurut Koryati (2005:2007) secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

## **6. Konsep Pemerintahan Desa**

Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pemerintahan desa adalah Kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat dari undang-undang Tentang Desa yang baru. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain :

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;
- d. Kebersamaan;
- e. Kegotongroyongan;
- f. Kekeluargaan;
- g. Musyawarah;
- h. Demokrasi;
- i. Kemandirian;
- j. Partisipasi;
- k. Kesetaraan;
- l. Pemberdayaan;
- m. Dan keberlanjutan;

## 7. Konsep Good Governance



Istilah *good governance* berasal dari induk berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *Govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan (Djohan, 2007 : 131)

Secara umum kualitas *Good governance* dapat tercapai apabila pemerintah dan instansi publik lainnya secara keseluruhan mampu bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Responsivitas akan meningkat jika masyarakat memiliki informasi yang lengkap mengenai proses dan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan (Smambela, 2008 : 51).

Dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan yang mana di perlukan pengelolaan dan pelaksanaan tugas pemerintah di tuntutan untuk menggunakan konsep *Good Governance* yaitu pemerintahan yang baik demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi. Khususnya pada organisasi publik yang dalam pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan di haruskan menerapkan *Good Governance* menurut Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil (dalam Sedarmayanti, 2012: 4) merumuskan arti *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan perinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

*Good Governance* menurut Mardiasno, (2002: 18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi investasi yang langka, dan penghindaran korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagitumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedermayanti, 2003: 7).

Berkaitan dengan *Good Governance*, Mardiasmo dalam Transaksian, (2005: 114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.

Selanjutnya Brian. C Smith (2007) juga mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* terdiri dari Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Penegakan Hukum, Pencegahan Korupsi, Pengentasan Kemiskinan, Orientasi Kesepakatan, Wawasan ke Depan dan Desentralisasi

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan *Good Governance* sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjadi kesinergisan

interaksi yang konstruksi di antara dominan-dominan negara, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2012: 4)

Pertama untuk menciptakan *good governance* yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas (accountability) adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Kumorotomo (dalam Dwiyanto, 2008: 98-99).

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 Penelitian terdahulu yang relevan**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Alpadri 2017	Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	Sama-sama ingin melihat penerapan Prinsip-prinsip Good Goovernance Di Desa	Metode Kualitatif  Lokasi Desa Bukit Kemuning, Kec Tapung Hulu Kabupaten Kampar
2.	Agus Suryadi (2016)	Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ditinjau Dari Perspektif Good Governance)	Sama-sama menggunakan Konsep Brian C. Smith	Metode Penelitian Kualitatif, lokasi penelitian di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung
3.	Gusty Abdillah Rizky N (2015)	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Purchasing	Sama-sama membahas barang dan jasa	Cakupan pembahasannya pemerintahan

**Sumber : olahan peneliti 2019**

Berdasarkan dari tabel penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan refrensi dalam penelitian ini, maka dapat penulis uraikan perbedaan dan

persamaan antara penelitian dengan penelitian terdahulu. Dimana pada peneliti Alpadri (2017) terdapat persamaan mengenai sama-sama ingin melihat penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Di Desa, sementara perbedaan terdapat pada metode yang digunakan Kualitatif . Selain itu perbedaan yang paling mendasar terletak pada Lokasi Desa Bukit Kemuning

Pada penelitian Agus Suryadi (2016) terdapat persamaan penelitian dalam menggunakan Konsep Brian C. Smith, namun terdapat juga perbedaan dalam menggunakan metode penelitian Kuantitatif .

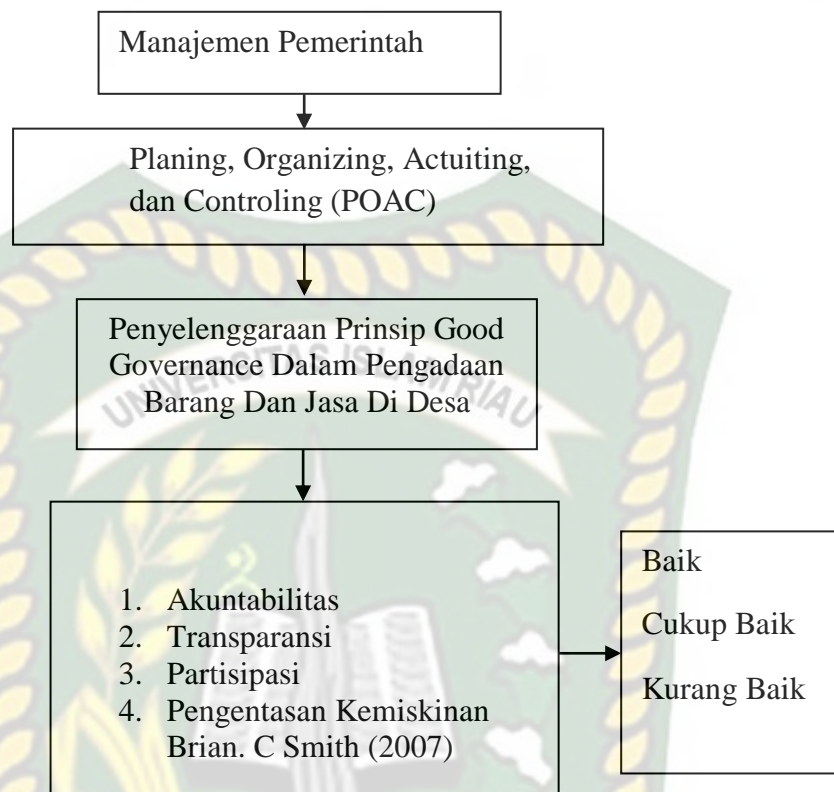
Penelitian Gusty Abdillah Rizky N (2015) terdapat persamaan objek yang diteliti mengenai barang dan jasa, namun terdapat beberapa beberapa fokus tugas yang diteliti. Sementara perbedaan terdapat pada cakupan pembahasannya pemerintahan.

### **C. Kerangka Pikir**

Berdasarkan variabel penelitian kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan unsur-unsur dalam analisis kinerja pegawai dalam gambaran alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambaran. II.I. Kerangka Pikiran Penelitian**



*Sumber : Modifikasi Penulis 2019*

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep operasional merupakan batasan penelitian Terhadap variabel yang diguna kan dalam penelitian jika untuk lebih memudahkan dalam menganalisis serta memperjelas arah penelitian, maka penulis merasa perlu membatasi dengan mengoperasionalkan konsep-konsep yang digunakan sehingga nantinya memberikan suatu kebenaran didalam penelitian. Penulis menetapkan konsep operasional variabel yang akan dikaji, sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan akan jasa dan layanan civil.
2. Penyelenggaraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan tata kelola pengadaan barang dan jasa di desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir
3. penyelenggaraan Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.
4. *Good Governance* sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif ddengan menjadi kesinergisan interaksi yang konstruksi di antara dominan-dominan negara, sektor swasta dan masyarakat
5. Manajemen pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan dan penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah pada tataran pemerintahan daerah.

6. Manajemen Sumberdaya Manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.
7. Kebijakan Pemerintah dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di desa adalah LKPP No 13 Tahun 2013
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggraan urusan pemerintahan dan
9. Yang dimaksud dengan Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kebijakan tertentu
10. Yang dimaksud dengan Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (dalam Munaf Yusri, 2016)
11. Yang dimaksud dengan Partisipasi adalah pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.
12. Yang dimaksud Pengentasan Kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.

## E. Operasionalisasi Variable

**Tabel II.2 Operasionalisasi Variabel Tentang Analisa Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
<p>Pemerintah tidak hanya sekedar melaksanakan secara rutinitas sesuai dengan fungsi dan tugas yang melekat kepadanya, akan tetapi pemerintahan dituntut untuk selalu siap merespon apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan bahkan harus pula mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis melalui sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Brian C. Smith mengemukakan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas</li> <li>2. Transparansi</li> <li>3. Pengentasan kemiskinan</li> </ol>	<p>Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir</p>	<b>1.Akuntabilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan tata kelola pengadaan barang dan jasa</li> <li>b. Mempunyai kopetensi</li> <li>c. System pengendalian internal</li> </ol>	<p>Baik</p> <p>Cukup baik</p> <p>Kurang baik</p>
		<b>2.Transparansi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan informasi</li> <li>b. Kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa Harus tertulis</li> <li>c. Prinsip keterbukaan</li> </ol>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		<b>3.Partisipasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa</li> <li>b. Akses masyarakat dalam dalam pengawasan penyelenggaraan barang dan jasa</li> <li>c. Kebebasan untuk menentukan masa depan terkait pengadaan barang dan jasa</li> </ol>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		<b>4.pengentasan kemiskinan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemenuhan hak dasar masyarakat</li> <li>b. pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat</li> <li>c. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan</li> </ol>	<p>Baik</p> <p>Cukup baik</p> <p>Kurang baik</p>

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019



## F. Teknik Pengukuran

Dari konsep-konsep pengukuran yang telah dikemukakan, maka penulis menetapkan teknik pengukuran variabel, adapun teknik-teknik pengukuran untuk variable Analisis Penyelenggaraan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir :

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada total skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila 3 dari 4 kriteria indikator variabel berada pada 66% - 33%

Kurang Baik : Apabila 2 dari 4 kriteria indikator variabel berada pada 0% - 33%

Untuk masing-masing indikator senagai berikut :

### 1. Akuntabilitas

Ukuran penilaiannya adalah;

Baik : Apabila seluruh kriteria sub indikator variabel berada pada 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator variabel berada pada berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator variabel berada pada total skor 0-33%.

## 2. Transparansi

Ukuran penilaiannya adalah;

Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator variabel berada pada total skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator variabel berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator variabel berada pada total skor 0-33%.

## 3. Partisipasi

Ukuran penilaiannya adalah;

Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator variabel berada pada total skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator variabel berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator variabel berada pada total skor 0-33%.

## 4. Pengentasan kemiskinan

Ukuran penilaiannya adalah;

Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator B variabel berada pada total skor 67-100%.

Cukup Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator variabel berada pada total skor 34-66%.

Kurang Baik : Apabila jawaban responden terhadap indikator variabel berada pada total skor 0-33%.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah survey deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung mengambil informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian keobjek yang akan diteliti berdasarkan pengamatan, baik berupa data dan bentuk dokumen, jawaban responden merupakan observasi sehingga diperoleh hasil Analisis dari penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau narasi dan berdasarkan hasil yang diperoleh lapangan.

Menurut Sugiyono (2009 : 15), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Sedangkan menurut Sugiyono (2013 : 14) Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen peneliti, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah diadakan suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran



Kabupaten Indragiri hilir. Alasan Peneliti memilih Desa Tanjung Simpang adalah bahwa pemerintah Desa kurang transparan atau terbukanya terhadap kegiatan pembangunan maupun kegiatan yang lainnya yang menggunakan dana, serta pemerintah desa juga kurang dalam keterbukaan terhadap masyarakat serta pemenuhan hak setiap masyarakat belum tercukupi sesuai dengan keinginan masyarakat.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang dijadikan sumber penelitian /totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang diteliti (bahan penelitian). Menurut cooper (dalam Sudaryono, 2018;165).

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, menurut Mardalis (dalam Sudaryono, 2018;167) menyatakan bahwa sampel yang kita gunakan harus dapat mewakili populasi yang telah dikemukakan, karena hakekat penggunaan sampel dalam suatu penelitian adalah dikarenakan sulit untuk meneliti seluruh populasi karena keterbatasan biaya dan waktu yang begitu banyak diperlukan jika harus meneliti seluruh populasi. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat didalam tabel sebagai berikut :

**Tabel III.I : Populasi Dan Sampel Analisis Penyelenggraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekdes	1	1	100%
3	Kepala Dusun	1	1	100%
4	Kepala Urusan	4	4	100%
5	BPD	3	3	100%
6	Masyarakat (KK)	212 (KK)	20	9%
	<b>Jumlah</b>	<b>222</b>	<b>30</b>	<b>13%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian ,2019

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yang penulis gunakan teknik *Simple Random Sampling (acak sederhana)* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak dimana populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. (dalam Sudaryono,2018;169).

#### E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Data primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yang di dapatkan langsung dari sampel atau responden penelitian melalui wawancara, kuesioner dan observasi

2. Data sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenaan dengan kegiatan pengawas, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah peneliti.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data antara lain;

1. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena obyek yang terjadi atau diteliti, sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang sulit diperoleh dari orang-orang yang dijadikan sumber data.
2. Kuisioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun penulis sesuai dengan indikator penelitian yang bertujuan kepada seluruh responden.
3. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
4. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melampirkan foto-foto yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dimaksud untuk memberikan gambaran dan bukti tentang bagaimana fakta pelaksanaan pelayanan tersebut dilapangan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisa dengan metode kuantitatif

secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dengan tabel dan uraian kemudian di analisa selanjutnya diambil kesimpulan. Teknik analisis data penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan kata numerik dari satu variabel dengan sebaran (Distribusi) frekuensi dengan tingkat skala pengukuran.
2. Sebaran data numerik ini di analisis berdasarkan bobot dan nilai responden.
3. Tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert, digunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator.

$$\text{Rumus skala likert: } \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$$

4. Ukuran persepsi di analisis berdasarkan rentang pengukuran yang dirumuskan.
5. Hasil persepsi dari setiap indikator di Rekapitulasi dan ditarik persentase dari satu variabel pelaksanaan.
6. Hasil persepsi disimpulkan berdasarkan rentang penilaian yang telah dirumuskan.



## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.II Jadwal Waktu Penelitian Tentang Analisa Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.**

No	JenisKegiatan	Tahun 2019															
		Juli - Oktober				November -januari				Januari-februari				Maret-April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PersiapanPenyusunan	■															
2	Seminar UP		■														
3	Perbaikan UP			■	■												
4	Revisikuesiner					■											
5	Rekomendasi survey						■	■									
6	Survey lapangan								■	■	■						
7	Analisis data											■					
8	Penyusunanlaporanhasil penelitian												■				
9	Konsultasirevisiskripsi													■			
10	Ujiankomprehensifskripsi														■	■	
11	Revisiskripsi																■
12	Penggandaanskripsi																■

Sumber Modifikasi penulis, 2019

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### IV.1 Sejarah Singkat Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran

##### Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur pesisir Pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditanda-tanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pantai Timur pesisir Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km<sup>2</sup> atau sekitar 54.43 % dari luas wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 00 36'LU — 10 07' LS dan 104 10' — 102 32' BT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat(Provinsi Jambi)
- Sebelah barat berbatsan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau).

Berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatera memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “Pintu gerbang Timur Sumatera” dalam berbagai aktifitas pembangunan. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut dengan penyebaran sungai hampir di seluruh kecamatan. Disamping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan arus air pada saat pasang surut, kondisi ini menggambarkan karakteristik wilayah ini yang juga lebih dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Parit”.

#### PETA KAB. INDRAGIRI HILIR



Untuk lebih jelasnya mengenai luas dan presentase wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. I Luas dan Presentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011**

No	Kecamatan	Luas (Has)	Persentase (%)
1.	Keritang	94.642	6,92
2.	Reteh	53.183	3,89
3.	Enok	44.941	3,29
4.	Tanah Merah	47.660	3,49
5.	Kuala Indragiri	71.495	5,23
6.	Tembilahan	15.164	1,11
7.	Tempuling	75.287	5,51
8.	Batang Tuaka	39.118	2,86
9.	Gaung Anak Serka	64.995	4,75
10.	Gaung	207.617	15,18
11.	Mandah	174.273	12,74
12.	Kateman	48.781	3,57
13.	Kemuning	104.984	7,68
14.	Tembilahan Hulu	13.899	1,02
15.	Pulau Burung	58.050	4,24
<b>16.</b>	<b>Pelangiran</b>	<b>85.396</b>	<b>6,24</b>
17.	Teluk Balengkong	42.774	3,13
18.	Concong	26.348	1,93
19.	Kempas	58.453	4,27
20.	Sungai Batang	40.489	2,96
Jumlah		1.367.551	100,00

Sumber : Draft RTRW INHIL 2011-2031

Kecamatan Pelangiran terdiri dari 1 Kelurahan dan 15 Desa dengan luas wilayah 531,22 KM atau 53,122 Ha . Batas- batas wilayah Kecamatan Pelangiran yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Belengkong, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kateman dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mandah. Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Pelangiran dari permukaan laut adalah 1 sampai 4 meter, di tepi-tepi sungai dan muara-muara parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah.



## A. Demografi

### a. Batas Wilayah

Letak Georafi Desa Tanjung Simpang, terletak diantara :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sakapalas Jaya  
dan Desa Simpang Kateman

Sebelah Selatan : Berbatasa dengan Kabupaten Pelalawan,  
Kecamatan Gas Dan Kecamatan Mandah

Sebelah Barat : Berbatasan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Simpang  
Kateman dan kecamatan Mandah

## B. Luas Wilayah

Pemukiman	: 1200 Ha
Pertanian Sawah	: -
Perkebunan	: 29250 Ha
Ladang/Tegalan	: -
Hutan	: ± 1000 Ha
Rawa-rawa	: ± 500 Ha
Perkantoran	: 1 Ha
Sekolah	: 1 Ha
Jalan	: 500 Ha
Lapangan Bola	: 1 Ha

## C. Orbitrasi

Sedangkan jarak dengan pusat pemerintahan (orbitrasi) adalah sebagai berikut :

- Jarak ke Ibukota Kecamatan Terdekat : 60 km
- Lama tempuh Ibu kota Kecamatan : 180 Menit
- Jarak Ibukota Kabupaten : ± 1000 km

- Lama jarak tempuh Ibu kota Kabupaten : 180 Menit

#### IV.2 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan komponen yang berada dalam suatu wilayah daerah tertentu dan juga faktor yang dominan dalam suatu pembangunan di wilayah, termasuk sumber daya manusia maka pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari data yang dapat dari monografi Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri hilir Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Simpang Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.086
2	Perempuan	3.082
<b>Jumlah</b>		<b>6.157</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung Simpang, 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Berarti terdapat perbedaan jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Tanjung Simpang.

#### IV.3 Keadaan Sosial

Dalam menjalankan kegiatan keagamaan perlu oleh sarana dan prasarana, salah satunya yaitu tempat ibadah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.3 jumlah Sarana Ibadah**

No	Sarana Ibadah	Agama	Jumlah
1.	Masjid/Musholah	Muslim	6
2.	Gereja	-	-
3.	Pura	-	-
4.	Wihara	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.559</b>	<b>6</b>

Sumber : Kantor Desa Tanjung Simpang 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Tanjung Simpang Berdasarkan Agama Muslim sebanyak 1.559 jumlah penduduk sebanyak 1.559.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sarana mesjid/Musholah berjumlah 6 sedangkan tempat ibadah yang lainnya seperti gereja, pura dan wihara belum ada.

#### **IV.4 Keadaan Ekonomi**

##### **1. Mata Pencaharian**

Mencari nafkah merupakan kebutuhan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir beranekaragam namun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Simpang berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah KK
1.	Petani	70
2.	Pedagang	35
3.	PNS	7
4.	Tukang	20
5.	TNI/POLRI	-
6.	Pensiunan	-
7.	Pengemudi Speed Boat	10
8.	Buruh	30
9.	Jasa Persewahan	-
10.	Swasta	15
11.	Lain-lain	25
	<b>Jumlah</b>	<b>212 KK</b>

Sumber : Kantor Desa Tanjung Simpang 2019

## 2. Pertanian

Di Desa Tanjung Simpang lebih dominan tanaman Kelapa yaitu seluas 1000 Ha. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5 Luas berdasarkan jenis pertanian**

No	Jenis Pertanian	Luas Lahan (Ha)
1.	Padi Sawah	-
2.	Jagung	100 Ha
3.	Palawija	-
4.	Tembakau	-
5.	Cabe	-
6.	Coklat	-
7.	Sawi	-
8.	Karet	-
9.	Kelapa	1000 Ha
10.	Kopi	-
11.	Singkong	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1100 Ha</b>

Sumber : Kantor Desa Tanjung Simpang 2019



## IV.5 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Tanjung Simpang

### 1. Lembaga Pemerintahan

Jumlah Aparat Desa

- Kepala Desa : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Perangkat Desa : 11 Orang
- BPD : 7 Orang

### 2. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- LPM : -
- PKK : 30
- Posyandu : 10
- Pengajian : 12
- Arisan : -
- Simpan Pinjam : -
- Kelompok Tani : 7
- Karang Taruna : 30
- Ormas : -

### 3. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- Dusun I : Selesung Jaya
- Dusun II : Selayar
- Dusun III : Pasar Tanjung Simpang
- Dusun IV : Simpang Kiri
- Dusun V : Simpang kanan

### 4. Struktur Organisasi

- Kepala Desa : ABU NAWAS
- Sekretaris Desa : ARIANTO
- Kepala Urusan Pemerintahan : ELLIANA, SE
- Kepala Urusan Umum : AFRIZAL
- Kepala Urusan Pembangunan : EDI INDRA KESUMA

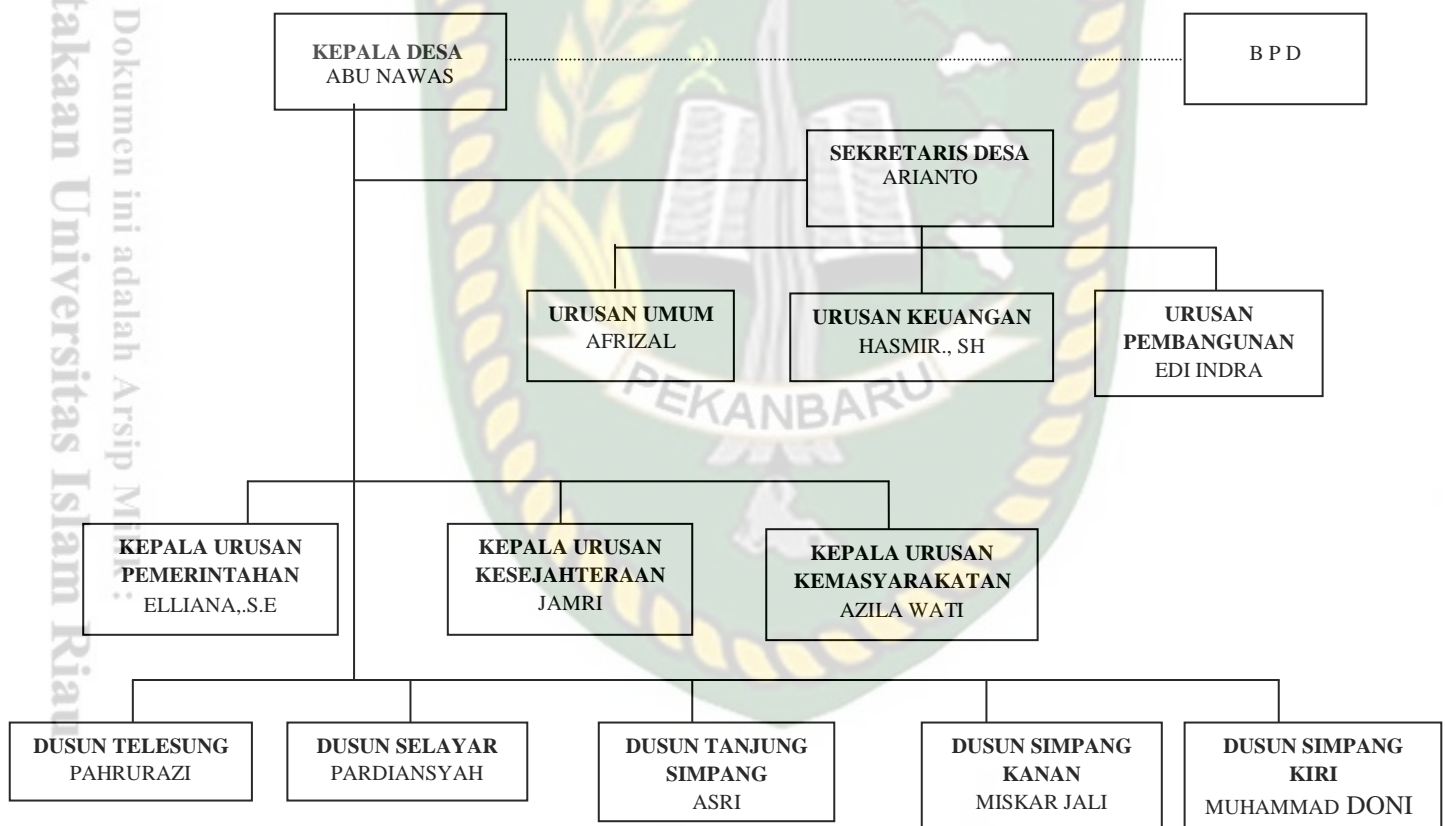
- Kepala Urusan Keuangan : HASMIR, SH
- Kepala Urusan Kesejahteraan : JAMRI
- Kepala Urusan Kemasyarakatan : AZILA WATI

Kepala Dusun :

- Dusun I : FAHRURAZI
- Dusun II : PARDIANSYAH
- Dusun III : ASRI
- Dusun IV : LINTAR
- Dusun V : MISKARJALI

#### IV.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

**Gambar IV.I Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**



*Sumber : Kantor Desa Tanjung Simpang 2019*

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari Aparat Pemerintahan Desa yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari terpilih menjadi sampel untuk memberikan penjelasan mengenai Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Data tersebut diperoleh dari kuisisioner yang telah disebarakan kepada Aparat Pemerintahan Desa sebanyak 30 orang.

Hasil kuisisioner diperoleh dari sejumlah data yang diperlukan, meliputi data identitas responden dan tanggapan responden tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **A. Identitas Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Responden penelitian ini adalah Kepala Desa beserta perangkat desa dan BPD. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

### 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin pada lokasi penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat jenis kelamin responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.1 Jenis Kelamin Responden Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	23	77%
2.	Perempuan	7	23%
<b>Jumlah</b>		30	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2020*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih dominan dari pada perempuan, dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 23 orang atau 77% sedangkan responden perempuan berjumlah 7 orang atau 23%.

### 2. Unsur Responden

Usia merupakan isyarat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa dengan baik. Usia muda akan mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal dibandingkan yang usia lebih tua, terkadang terkendala dengan umur yang sudah tergolong usia muda yaitu kurang dari 45 tahun dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu memberikan pengaruhnya dalam bentuk peranannya, sedangkan responden yang masih tergolong usia tua yaitu 45 tahun akan mendapat kesulitan untuk melaksanakan tugasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel V.2 Umur Responden Berdasarkan Usia Termuda dan Usia Tertua**

No	Usia	Responden	Persentase
1.	20-25	1	3%
2.	26-30	14	47%
3.	31-35	3	10%
4.	36-40	3	10%
5.	41-45	5	17%
6.	46-50	2	7%
7.	50 Keatas	2	7%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat umur responden dalam penelitian ini paling banyak adalah 26-30 sebanyak 14 orang atau 47% dan 41-45 sebanyak 5 oarang atau 17% sedangkan umur 31-35, 36-40 sebanyak 3 orang atau 10% dan yang umur 41-45, dan 50 Keatas sebanyak 2 orang atau 7 yang paling sedikit adalah umur 20-25 sebanyak 1 orang atau 3%.

### **3. Tingkat Pendidikan Responden**

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang akan diberikan oleh responden, semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin baik pula jawaban yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang diberikan oleh penelitian dalam kuisisioner penelitian. Dari hasil penelitian tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir serta penyebaran kuisisioner maka identitas rrsponden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan yang tertera pada tabel berikut ini :

**Tabel V.3 Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	-	-
2.	SMP	6	20%
3.	SMA	19	63%
4.	D3	2	7%
5.	S1	3	10%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak tamatan SMA yaitu sebanyak 19 orang dengan persentase 63%, sedangkan tingkat pendidikan responden paling sedikit yaitu D3 sebanyak 2 orang dengan persentase 7% , sedangkan untuk tamatan SMP sebanyak 6 orang dengan persentase 20% dan untuk tamatan S1 sebanyak 3 orang dengan persentase 10% dan untuk tamatan SD Tidak ada.

#### **B. Hasil Penelitian Tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

Dalam sebuah organisasi khususnya publik, tentunya memiliki aturan-aturan dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan menyangkut segala kepentingan publik, peraturan-peraturan tersebut penting dalam tertib administrasi dalam suatu kesatuan organisasi mengenai bagaimana suatu organisasi dapat mengelola sumber daya organisasi dengan menggunakan manajemen serta metode-metode apa saja yang digunakan untuk mencari tujuan yang ditentukan.

Prinsip Good Governance merupakan tata cara pemerintahan yang baik, yang mana dapat dikatakan pelaksanaan suatu organisasi pemerintahan ini merupakan ukuran dan tujuan dari organisasi pemerintah atau publik, khususnya di kantor Desa Tanjung Simpang yang merupakan organisasi publik tentunya

harus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan dari organisasi ini, seperti Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kebijakan tertentu, transparansi dalam memperoleh informasi, partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa, pengentasan kemiskinan seperangkat tindakan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.

Penyelenggaraan Good Governance di Kantor Desa Tanjung Simpang terlihat dari empat (4) indikator yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan pengentasan Kemiskinan. Untuk lebih jelasnya penelitian akan memaparkan setiap indikator sebagai berikut :

### **1. Indikator Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*Accountability*) ialah pertanggung jawaban kepada publik (Masyarakat umum), sebagai halnya kepada para pemilik (stakeholders) mengenai keputusan yang diambil Pertanggung jawaban dalam hal ini sejauh mana pemerintah desa dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang dilakukan mengenai program dan kegiatan serta pelayanan, sehingga kesalahan dari kegiatan yang dilaksanakan dapat diselesaikan dengan baik. Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator akuntabilitas, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.4 Penilaian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Akuntabilitas Pada Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tahapan tata kelola pengadaan barang dan jasa	3	6	1	10
2.	Mempunyai Kopeten	3	4	3	10
3.	System Pengendalian internal	1	2	7	10
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 10 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, cukup baik sebanyak 6 orang dan yang menjawab kurang baik 1 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, cukup baik sebanyak 4 orang dan jawaban kurang baik 3 orang . selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang menjawab baik sebanyak 1 orang, yang menjawab cukup baik sebanyak 2 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 7 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator akuntabilitas sebanyak 7 orang dengan rata-rata 2 dengan persentase 20%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator akuntabilitas sebanyak 12 dengan rata-rata 4 dengan persentase 40% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator akuntabilitas sebanyak 11 dengan rata-rata 4 dengan persentase 40%.



Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Desa indikator akuntabilitas bahwa responden menilai Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Simpang pada Tanggal 26 Desember 2019, penelitian mengajukan pertanyaan : Apa saja bentuk-bentuk Pengadaan Barang dan jasa di Desa Tanjung Simpang ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Bentu-bentuk pengadaan barang dan jasa yang sudah tercapai maupun lagi proses adalah pembangunan jalan, dan alat-alat kantor yang dibutuhkan seperti komputer, print, kertas dan alat tulis”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan. Berapakah dalam satu Tahun pelaporan mengenai pengadaan barang dan jasa ?

Ia mengatakan bahwa :

“untuk pelaporan mengenai pengadaan barang dan jasa itu dalam satu (1) Tahun satu (1) Kali .

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan tentang pengelolaan barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari wawancara, dan obsevasi tersebut dan berdasarkan tabel V.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Penyelenggraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Tanjung

Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Cukup Baik dengan persentase 40% dari jumlah responden yang berjumlah 10 orang.

**Tabel V.5 Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Akuntabilitas Pada Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tahapan tata kelola pengadaan barang dan jasa	7	9	4	20
2.	Mempunyai Kopeten	5	11	4	20
3.	System Pengendalian internal	5	7	8	20
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>30%</b>	<b>45%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 20 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 7 orang, cukup baik sebanyak 9 orang dan yang menjawab kurang baik 4 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik sebanyak 11 orang dan jawaban kurang baik 4 orang . selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang menjawab baik sebanyak 5 orang, yang menjawab cukup baik sebanyak 7 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 8 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator akuntabilitas sebanyak 17 orang dengan rata-rata 6 dengan persentase 30%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator

akuntabilitas sebanyak 27 dengan rata-rata 9 dengan persentase 45% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator akuntabilitas sebanyak 16 dengan rata-rata 5 dengan persentase 25%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Masyarakat indikator akuntabilitas bahwa responden menilai Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Tanjung Simpang pada Tanggal 28 Desember 2019, penelitian mengajukan pertanyaan :

Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban Kepala Desa dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Inderagiri Hilir ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Seperti yang saya lihat dari tahun 2016-2019 ini dalam pengadaan barang dan jasa sangat mengalami kemajuan apa lagi soal penanggung jawaban dari berbagai bentuk pangaan yang dilakuakn oleh desa mereka mampu mempertanggung jawabkan apa yang meraka kerjakan dilapangan”*

Sebagai mana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yang bernama Basri di kediamannya :

Bagaimana menurut bapak pengelolaan dan pengendalian dalam pengadaan barang dan jasa ?

Ia mengatakan bahwa :

*“yang saya lihat pengelolaan pengadaan barang dan jasa cukup baik apa lagi pada saat ini pengendalian dalam pengadaan sudah di percayakkn kepada satu yang sama-sama kita tunjuk sehingga ini membuat pengadaan barang dan jasa cukup baik dari pada tahun sebelumnya”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa dalam berkompeten dan dalam pengendalian internal kegiatan Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Cukup Baik dengan persentase 45% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

## **2. Indikator Transparansi**

Transparansi (transparency) ialah keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, transparansi menyangkut pemberian informasi mengenai kegiatan dan program yang dimiliki oleh Kantor Desa Tanjung Simpang dan dalam pelayanan kemudahan dalam mendapatkan informasi bagi masyarakat agar dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan informasi bagi masyarakat agar dapat memudahkan masyarakat dalam



mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai persyaratan dan biaya pelayanan. Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan serta pengelolaan data maka didapatkan jawaban responden mengenai indikator Transparansi, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.6 Penilaian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Transparansi Pada Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menyediakan informasi	1	4	5	10
2.	Kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa Harus tertulis	2	6	2	10
3.	Prinsip keterbukaan	0	6	4	10
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Data tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 10 responden untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik sebanyak 4 orang dan yang menjawab kurang baik 5 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, cukup baik sebanyak 6 orang dan yang menjawab kurang baik 2 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang memberikan tanggapan baik 0 orang, cukup baik 6 orang dan kurang baik sebanyak 4 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Transparansi sebanyak 3 dengan rata-rata 1 dengan persentase 10%. Sementara itu untuk

tanggapan cukup baik terhadap indikator transparansi sebanyak 16 dengan rata-rata 5 dengan persentase 50%. Sedangkan yang memberi tanggapan kurang baik terhadap indikator transparansi Sebanyak 11 dengan rata-rata 4 dengan persentase 40%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator transparansi bahwa responden menilai Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa pada tanggal 27 Desember 2019, peneliti mengajukan pertanyaan, Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah menerapkan prinsip keterbukaan ?

Ia menjawab :

*“sejauh ini maupun selama ini saya maupun teman-teman yang ada di kantor desa ini telah berusaha menerapkan prinsip keterbukaan agar masyarakat bisa mengetahui apa yang kita lakukan untuk desa maupun dengan adanya prinsip keterbukaan ini kita semua bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan, apakah informasi yang disediakan bisa diakses oleh masyarakat luas ?

Ia menjawab bahwa :

*“untuk saat ini terkait informasi yang disediakan belum bisa diakses oleh semua masyarakat karna terkendala oleh kemampuan SDM yang ada, dan ada*

*beberapa informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas namun tetap saja masyarakat tidak memahami hal tersebut, mereka tetap datang menemui salah satu dari kami dikantor”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya Informasi tentang pengadaan barang dan jasa dalam berkompeten dan dalam pengendalian internal kegiatan Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Cukup Baik dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 10 orang.

**Tabel V.7 Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Transparansi Pada Penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Menyediakan informasi	7	11	2	20
2.	Kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa Harus tertulis	5	10	5	20
3.	Prinsip keterbukaan	0	12	8	20
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>55%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Data tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 20 responden untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 7 orang, cukup baik sebanyak 11 orang dan yang menjawab kurang baik 2 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik sebanyak 10 orang dan yang menjawab kurang baik 5 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang memberikan tanggapan baik 0 orang, cukup baik 12 orang dan kurang baik sebanyak 8 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Transparansi sebanyak 12 dengan rata-rata 4 dengan persentase 20%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator transparansi sebanyak 33 dengan rata-rata 11 dengan persentase 55%. Sedangkan yang memberi tanggapan kurang baik terhadap indikator transparansi Sebanyak 15 dengan rata-rata 5 dengan persentase 25%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator transparansi bahwa responden menilai Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPD pada tanggal 28 Desember 2019, peneliti mengajukan pertanyaan, Apakah Informasi terkait barang dan jasa mudah didapatkan ?

Ia menjawab bahwa :



*“Terkait informasi mengenai pengadaan barang dan jasa saat ini masih terbatas karna terkadang informasi yang diutuhkan masyarakat masih belum tersedia ini karna masih keterbatasan SDM yang bisa mengelola informasi terkait barang dan jasa”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan, Bagaimana kebijakan dan prinsip keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa ?

Ia Menjawab bahwa :

*“Kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa itu mengungkana peraturan LKPP dan terkait perinsip keterbuan ini sudah cukup baik dan terus melakukan yang terbaik karna ini menyangkut informasi untuk orang banyak”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih Sulitnya Innformasi yang didapat terkait pengadaan barang dan jasa kegiatan Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.7 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Cukup Baik dengan persentase 55% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

### **3. Indikator Partisipasi**

Pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan

jasa.setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan aerta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator Partisipasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.8 Penilaian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Partisipasi pada penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simping Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa	4	4	2	10
2.	Akses masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan barang dan jasa	5	3	2	10
3.	Kebebasan untuk menentukan masa depan terkait pengadaan barang dan jasa	0	6	4	10
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>30</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas terlihat bahwa jawaban keseluruhan 10 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 4 orang, cukup baik sebanyak 4 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 5, cukup baik 3 orang dan yang menjawab kurang baik 2 orang. Untuk pertanyaan ketiga responden yang memberikan tanggapan baik sebanyak 0 orang, cukup baik 6 orang dan kurang baik sebanyak 4 orang. Jadi total jawaban responden yang

memberikan tanggapan baik terhadap indikator partisipasi sebanyak 9 dengan rata-rata 3 dengan persentase 30% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator partisipasi sebanyak 13 dengan rata-rata 4 dengan persentase 40% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator partisipasi sebanyak 8 dengan rata-rata 3 persentase 30%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Partisipasi bahwa responden menilai Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa pada tanggal 27 Desember 2019, penelitian mengajukan pertanyaan : dalam pengadaan barang dan jasa ini apakah masyarakat diberi kebebasan dalam menentukan masa depan terkait pengadaan barang dan jasa ?

Ia mengatakan bahwa :

*“tentu saja masyarakat diberikan kebebasan dalam pengadaan baeang dan jasa ini karna masyarakat yang mengetahui apa yang mereka butuhkan kami disini hanya menyalurkan keinginan dari masyarakat terkait barang dan jasa”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : apakah masyarakt memiliki nilai paerisipasi yang tinggi terkait pengagdaan barang dan jasa ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Jika dibantingkan denagn tahun sebelumnya partisipasi masyarakat saat ini jauh lebih meningkat dalam arti cukup baik dari tahun sebelumnya karna*

*ditahun-tahun sebelumnya masyarakat yang ikut berpartisipasi sangat sedikit mereka lebih memilih kesibukan pribadinya”*

**Tabel V.9 Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Partisipasi pada penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa	6	10	4	20
2.	Akses masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan barang dan jasa	8	9	3	20
3.	Kebebasan untuk menentukan masa depan terkait pengadaan barang dan jasa	6	9	5	20
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>7</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>35%</b>	<b>45%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas terlihat bahwa jawaban keseluruhan 20 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik sebanyak 10 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 8 orang, cukup baik 9 orang dan yang menjawab kurang baik 3 orang. Untuk pertanyaan ketiga responden yang memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik 9 orang dan kurang baik sebanyak 5 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator partisipasi sebanyak 20 dengan rata-rata 7 dengan persentase 35% sementara itu untuk



tanggapan cukup baik terhadap indikator partisipasi sebanyak 28 dengan rata-rata 9 dengan persentase 45% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator partisipasi sebanyak 12 dengan rata-rata 4 persentase 20%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Partisipasi bahwa responden menilai Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang bernama pak aziz pada tanggal 27 Desember 2019, peneliti mengajukan pertanyaan, Apakah masyarakat ikut terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ?

Ia mengatakan bahwa :

*“masyarakat selalu ikut terlibat dalam setiap dilakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa”*

Sebagai mana yang dikatakan dengan masyarakat yang bernama Ali Wafa saat di wawancara dengan jawaban yang masih sama :

*“Saya sebagai masyarakat melihat partisipasi masyarakat di desa ini sudah cukup baik”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis melihat masih sulitnya Akses masyarakat dalam dalam pengawasan penyelenggaraan barang dan jasa kegiatan Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan

observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.9 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Cukup Baik dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

#### 4. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan Kemiskinan merupakan seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan aerta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator Pengentasan kemiskinan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.10 Penilaian Responden Unsur Desa Tentang Indikator Pengentasan Kemiskinan pada penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	pemenuhan hak dasar masyarakat	1	5	4	10
2.	pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat	1	4	5	10
3.	Pelaksanaan pengentasan kemiskinan	3	7	0	10
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>30</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 10 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik 5 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 4 orang . selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik 4 orang dan yang jawaban kurang baik 5 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga responden yang menjawab baik 3 orang, cukup baik 7 orang dan kurang baik 0 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator pengentasan kemiskinan sebanyak 5 dengan rata-rata 2 dan persentase 20% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator pengentasan kemiskinan sebanyak 16 dengan rata-rata 5 dan persentase 50% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator pengentasan kemiskinan sebanyak 9 dengan rata-rata 3 dan persentase 30%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator pengentasan kemiskinan bahwa responden menilai Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pada Tanggal 26 Desember 2019, peneliti mengajukan pertanyaan : apakah pemenuhan hak dasar masyarakat telah dipenuhi sebagai mana yang dibutuhkan ?

Ia mengatakan bahwa :

“Tentu saja iya, kami akan memenuhi kebutuhan masyarakat namun saat ini masih terdapat masyarakat yang belum kami penuhi kebutuhannya namun kami akan terus berusaha agar seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan kami maka kami akan memenuhinya”

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : apakah masyarakat merasa puas setelah kebutuhannya terpenuhi ?

Ia mengatakan bahwa :

“masyarakat sangat puas setelah kebutuhannya terpenuhi namun ada juga yang tidak merasa puas bahkan mereka kecewa namun bukan berarti kami tidak peduli dengan keadaannya kami begitu peduli namun mereka tidak sekarang bisa saja besok adalah giliran mereka yang akan kami penuhi kebutuhannya”.

**Tabel V.11 Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Pengentasan Kemiskinan pada penelitian Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	pemenuhan hak dasar masyarakat	4	10	6	20
2.	pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat	6	6	8	20
3.	Pelaksanaan pengentasan kemiskinan	3	10	7	20
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>45%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 20 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 4



orang, cukup baik 10 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 6 orang . selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik 6 orang dan yang jawaban kurang baik 8 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga responden yang menjawab baik 3 orang, cukup baik 10 orang dan kurang baik 7 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator pengentasan kemiskinan sebanyak 13 dengan rata-rata 4 dan persentase 20% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator pengentasan kemiskinan sebanyak 26 dengan rata-rata 9 dan persentase 45% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator pengentasan kemiskinan sebanyak 21 dengan rata-rata 7 dan persentase 35%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator pengentasan kemiskinan bahwa responden menilai Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang bernama Ibuk Aisyah Pada tanggal 27 Desember 2019 dengan pertanyaan, Apakah pemenuhan dasar masyarakat telah terpenuhi ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Dalam pemenuhan dasar masyarakat salah satunya saya sebagai masyarakat telah terpenuhi dengan cukup baik meskipun ada beberapa permasalahan salah satunya belum meratanya dalam pemenuhan kebutuhan*

*kepada masyarakat yang kurang mampu dan masih sering terjadinya mereka yang mampu malah mendapatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi terlebih dahulu”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : Bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Pertumbuhan ekonomi di Desa Tanjung Simpang ini sudah bisa dibilang cukup baik karna hampir seluruh masyarakatnya memiliki pekerjaan dan bertani namun ada juga beberapa masyarakat yang sulit untuk memenuhi kehidupannya tapi ini telah diberi berupa bantuan agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat kurangnya pemenuhan hak dasar masyarakat dalam dalam penyelenggaraan barang dan jasa kegiatan Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.11 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dinilai Cukup Baik dengan persentase 40% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

Namun dalam Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, masih ada terjadi hambatan-hambatan.

**Tabel V.12 Rekapitulasi Unsur Desa Tanggapan Responden Penelitian Tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penelitian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Akuntabilitas	2	4	4	10
2.	Transparansi	1	5	4	10
3.	Partisipasi	3	4	3	10
4.	Pengentasan Kemiskinan	2	5	3	10
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>40</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
	<b>Persentase</b>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Tabel diatas tentang Rekapitulasi Unsur Desa menggambarkan pendapat responden terkait Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dari rekapitulasi data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden yang berpendapat Baik yaitu sebanyak 8 atau jika dipersentasekan sebesar 20% dengan rata-rata 2, sedangkan cukup baik yaitu 18 atau jika dipersentasekan sebesar 40% dengan rata-rata 4, sedangkan kurang baik yaitu 13 atau jika dipersentasekan sebesar 30% dengan rata-rata 3.

Dari hasil analisis data yang dilakukan yang terlihat dalam tabel V.12 pada indikator Akuntabilitas rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 2 tanggapan, cukup baik 4 tanggapan dan kurang baik 3 tanggapan. Sementara itu untuk indikator transparansi rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 1 tanggapan, cukup baik 5 tanggapan, kurang baik 4 tanggapan, indikator partisipasi rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 3 tanggapan, cukup baik sebanyak 4 tanggapan, kurang baik 3 tanggapan, untuk

indikator pengentasan kemiskinan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 2 tanggapan, cukup baik sebanyak 5 dan kurang baik sebanyak 3 tanggapan.

Maka dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dikategori “**Cukup Baik**”. Karena dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan tanggapan responden yakni cukup baik dengan nilai tertinggi 18 tanggapan dibandingkan baik dengan nilai 8 dan kurang baik 13 tanggapan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan pemerintahan desa dalam Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga masyarakat belum secara keseluruhan mengetahui Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa yaitu : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Dan Pengentasan Kemiskinan.

**Tabel V.13 Rekapitulasi Unsur Masyarakat Tanggapan Responden Penelitian Tentang Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Item Penelitian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Akuntabilitas	6	9	5	20
2.	Transparansi	4	11	5	20
3.	Partisipasi	7	9	4	20
4.	Pengentasan Kemiskinan	4	9	7	20
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>80</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
	<b>Persentase</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*



Tabel diatas tentang Rekapitulasi Unsur Masyarakat menggambarkan pendapat responden terkait Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dari rekapitulasi data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden yang berpendapat Baik yaitu sebanyak 21 atau jika dipersentasekan sebesar 25% dengan rata-rata 5, sedangkan cukup baik yaitu 38 atau jika dipersantesan sebesar 50% dengan rata-rata 10, sedangkan kurang baik yaitu 21 atau jika dipersentasekan sebesar 25% dengan rata-rata 5.

Dari hasil analisis data yang dilakukan yang terlihat dalam tabel V.13 pada indikator Akuntabilitas rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 6 tanggapan, cukup baik 9 tanggapan dan kurang baik 5 tanggapan. Sementara itu untuk indikator transparansi rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 4 tanggapan, cukup baik 11 tanggapan, kurang baik 5 tanggapan, indikator partisipasi rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 7 tanggapan, cukup baik sebanyak 9 tanggapan, kurang baik 4 tanggapan, untuk indikator pengentasan kemiskinan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 4 tanggapan, cukup baik sebanyak 9 dan kurang baik sebanyak 7 tanggapan.

Maka dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dikategori **“Cukup Baik”**.

Karena dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan tanggapan responden yakni cukup baik dengan nilai tertinggi 38 tanggapan dibandingkan baik dengan nilai 21 dan kurang baik 21 tanggapan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan pemerintahan desa dalam Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga masyarakat belum secara keseluruhan mengetahui Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa yaitu : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Dan Pengentasan Kemiskinan.

**C. Hambatan-hambatan yang di hadapi Penyelenggaraan Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir**

1. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat, jarang dilakukan dikarenakan perangkat Desa dan BPD belum mempunyai kemampuan dalam mengolah pengadaan barang dan jasa sehingga yang mengetahui informasi sepenuhnya hanya Kepala Desa saja yang mengetahuinya.
2. Pemerintah desa kurang transparan atau terbukannya terhadap kegiatan pembangunan jalan maupun kegiatan jasa lainnya yang menggunakan dana masih ada yang belum transparan terkait informasi dana yang masuk maupun dana yang keluar informasi yang berkaitan dengan dana masih sulit di dapat namun informasi diluar dari dana ini sudah trasparan.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat musyawarah desa terkait kemajuan desa yang berhubungan dengan barang dan jasa ini sangat kurang masyarakat yang berpartisipasi padahal momen tersebut merupakan

kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kemajuan desa, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh desa.

4. Pengentasan kemiskinan masyarakat banyak memberikan kepada pemerintah desa yang tidak sesuai dengan kondisinya saat ini, sehingga ini menjadi kesulitan kami mendapat data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementas Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abidin, Said, Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah: Jakarta
- Adi Nugroho, 2004. *Analisis dan Perancangan Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek*, Informatika Bandung, Bandung.
- Agus R Sartono. 2004, *Manajemen ri dan Aplikasi*. Edisi Keempat Penerbit BPFE Yogyakarta
- Agus Sabardi, 2001. *Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : BPFE.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Alpadri, *Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*,Kampar. 2017
- Budiarjo, Miriam.2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gusty Abdillah Risky N, *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Purchasing*,2015
- Handoko, Hani, 1996, *Manajemen Persoalan dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Jakarta :Gramedia Widiasarana Indonesia



- Hartatik, Indah Puji. 2014. *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Yogyakarta :Laksana.
- Hasibuan, Malayu, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Khomaruddin, 2010 *Pengantar Manajemen Perusahaan*. Jakarta, Gramedia.
- Kusdyah Ike Rachmawati, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi Yogyakarta.
- Koryati dkk, 2005. *Akuntabilitas Pemerintahan lokal dalam otonomi daerah*. Pustaka Kendi. Yogyakarta.
- Labolo, Mohadam,2011,*Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Press
- Manullang, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mardiasno, 2002, *otonomi dan manajemen keuangan daerah* . Yogyakarta
- M.Munandar. 2000. *Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoodinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPFE
- , A. S. (2014). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Munaf Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Nazir, M.2009. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu . 2003. *Kimbernologoy Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta, Rineka Cipta
- .2010. *Budaya Organisasi*, Jakarta : Rineka Cipta.

- \_\_\_\_\_,2011.*Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) jilid I*. PT Rineka Cipta.  
Jakarta
- Nurcholis. 2004. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Erlangga indonesia : Jakarta Keuangan Teo
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban*, Jakarta, 2007
- Rasul, Syahrudi. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntansi Kinerja dan Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod
- Sarwoto. 1983. *Struktur Organisasi Perusahaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti,.2012.*Good Governance: Kepemerintahan yang Baik*. Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. CV. Mandar Maju
- Semambel, 2008, *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P, 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, PT Rineka Cipta.  
Jakarta.
- Smith, Brian C. 2007. *Good Governance and Development*. New york: Palgrave Macmillan
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

- \_\_\_\_\_. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Teguh Yuwono, 2001. *Manajemen Otonomi Daerah*, Pusat Kegiatan Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang.
- Turner and Hulme (1997), *Governance, Administration and Making The State Work*, London, Macmillan Press
- Wasistino, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung : CV Fokusmedia
- Wibawa, Samudra. Et.Al., 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Zulkifli DKK. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol Uir. Pekanbaru
- Zulkifli dan Moris. 2014. *Fungsi-fungsi manajemen*. Fisipol Uir. Pekanbaru

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013

Lampiran Peraturan Kebijakan (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015

### **Jurnal**

Agus Suryadi, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Ditinjau Dari Perspektif Good Governance)*, Bangka Belitung, 2016

Ni Wayan Rustiarini , *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016

Hasbullah malau, *Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat*, Vol.IX No.2 Th.2013

### **Web Site**

<http://respositry.umy.ac.id>, diakses 30 Juli 2019, 21.30 Wib

<http://www.pengadaan.web.id/2016/10/penjelasan-lengkap-pengadaan-barang-jasa-di-desa>, diakses 30 Juli 2019, 22.15 Wib

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengentasan\\_kemiskinan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengentasan_kemiskinan), diakses 15 Agustus 2019